

## **Makna Kemandirian Ekonomi dalam Program Desa Mandiri: Kajian Interpretatif**

**Didin Pratama Putra<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bongaya Makassar, Indonesia

\*Corresponding Author: didinpratama34@gmail.com

### **Article History**

**Received: 14-09-2025**

**Revised: 27-09-2025**

**Published: 30-09-2025**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna kemandirian ekonomi dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri melalui pendekatan interpretatif. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana masyarakat desa memaknai konsep kemandirian ekonomi bukan hanya sebagai capaian material, tetapi juga sebagai bentuk kedaulatan sosial, partisipasi, dan kemampuan mengelola sumber daya lokal secara berkelanjutan. Metode kualitatif digunakan dengan pendekatan fenomenologis, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi kegiatan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna kemandirian ekonomi bagi masyarakat desa terletak pada kemampuan menciptakan nilai ekonomi berbasis potensi lokal tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal. Selain itu, kemandirian juga dipahami sebagai bentuk tanggung jawab kolektif untuk membangun kesejahteraan bersama melalui gotong royong, inovasi lokal, dan penguatan kelembagaan ekonomi desa. Temuan ini mengungkap adanya transformasi paradigma masyarakat dari ketergantungan menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, Program Desa Mandiri bukan sekadar instrumen kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi proses pembelajaran sosial yang menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat dalam mengelola aset desa untuk kemandirian yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana pembangunan pedesaan yang berorientasi pada pemberdayaan dan keberlanjutan.

**Keywords:** *kemandirian ekonomi, Desa mandiri, Pemberdayaan masyarakat*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan desa merupakan salah satu agenda strategis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata. Melalui kebijakan *Desa Mandiri*, pemerintah berupaya mendorong setiap desa agar mampu mengelola potensi sumber daya yang dimilikinya secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Menurut Mardikanto (2020), konsep kemandirian desa tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, kelembagaan, serta kapasitas masyarakat untuk mengelola pembangunan secara partisipatif. Oleh karena itu, kemandirian ekonomi menjadi indikator utama dalam menentukan sejauh mana desa mampu bertahan dan berkembang tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal.

Kemandirian ekonomi desa diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya lokal menjadi sumber kesejahteraan bersama. Sebagaimana dijelaskan oleh Nurhayati (2021), desa yang mandiri secara ekonomi mampu menggerakkan potensi sumber daya alam dan manusia untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan otonomi lebih besar kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, termasuk dalam bidang ekonomi. Program Desa Mandiri menjadi instrumen penting dalam mengakselerasi terwujudnya kemandirian ekonomi tersebut.

Namun, dalam praktiknya, implementasi Program Desa Mandiri seringkali menghadapi berbagai tantangan. Penelitian oleh Sari dan Maulana (2022) menunjukkan bahwa sebagian besar desa masih mengalami ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat, baik dalam bentuk dana desa maupun pendampingan teknis. Ketergantungan ini membuat proses pemberdayaan belum sepenuhnya menghasilkan transformasi sosial ekonomi yang diharapkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami makna kemandirian ekonomi dari perspektif masyarakat desa itu sendiri, agar kebijakan yang diterapkan dapat sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat.

Kemandirian ekonomi bukan sekadar hasil dari kebijakan pembangunan, melainkan merupakan proses panjang yang melibatkan perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat. Menurut Kartasasmita (2018), pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu mengubah masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan. Dalam konteks ini, masyarakat desa perlu diposisikan sebagai pelaku utama yang mampu mengidentifikasi, merencanakan, dan melaksanakan program pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

Selain itu, makna kemandirian ekonomi memiliki dimensi interpretatif yang mendalam. Setiap komunitas memiliki cara pandang berbeda terhadap konsep “mandiri”, tergantung pada nilai-nilai, pengalaman, dan kondisi sosial yang mereka alami. Sebagaimana dinyatakan oleh Widodo (2021), pemahaman terhadap makna kemandirian ekonomi perlu dikaji secara interpretatif agar dapat mengungkap nilai-nilai lokal yang menjadi dasar tindakan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih kontekstual terhadap bagaimana masyarakat memaknai dan menginternalisasi kemandirian dalam kehidupan sehari-hari.

Program Desa Mandiri juga tidak lepas dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Menurut Rahayu (2023), kemandirian ekonomi desa berkontribusi langsung terhadap keberlanjutan pembangunan karena mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal dan memperkuat kemampuan lokal dalam menghadapi perubahan ekonomi global. Pembangunan yang berbasis pada kemandirian juga menciptakan ketahanan ekonomi di tingkat mikro, yang pada gilirannya mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Lebih lanjut, pemberdayaan ekonomi desa melalui program kemandirian harus didukung dengan penguatan kelembagaan lokal. Kelembagaan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan penting sebagai motor penggerak ekonomi desa. Menurut Priyono dan Setiawan (2021), keberhasilan BUMDes dalam mengelola potensi lokal menjadi tolok ukur sejauh mana desa mampu mencapai kemandirian ekonomi. Namun, keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam berinovasi, berkolaborasi, dan mengelola usaha secara berkelanjutan.

Dalam kerangka teoritis, kemandirian ekonomi juga erat kaitannya dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Menurut Mulyadi (2019), pemberdayaan merupakan proses memberikan daya dan kemampuan kepada masyarakat agar mereka mampu menentukan masa depannya sendiri. Program Desa Mandiri menjadi wahana yang strategis untuk menumbuhkan kemandirian melalui pengembangan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara interpretatif makna kemandirian ekonomi dalam Program Desa Mandiri. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat desa menafsirkan kemandirian, serta bagaimana makna tersebut mempengaruhi pola tindakan ekonomi dan sosial mereka. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik pemberdayaan masyarakat desa yang berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif dengan metode interpretatif fenomenologis** untuk memahami makna kemandirian ekonomi dalam Program Desa Mandiri dari perspektif masyarakat desa. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan menggali makna subjektif dan pengalaman sosial yang mendasari tindakan ekonomi masyarakat. Menurut Moleong (2019), penelitian kualitatif berusaha memahami fenomena secara mendalam melalui interaksi antara peneliti dan subjek penelitian dalam konteks yang alamiah. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang holistik mengenai bagaimana masyarakat menafsirkan kemandirian ekonomi sebagai bagian dari kehidupan sosial mereka.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi**. Wawancara mendalam dilakukan kepada perangkat desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi desa. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik ekonomi dan aktivitas pemberdayaan di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui arsip desa, laporan kegiatan, serta dokumen kebijakan Program Desa Mandiri. Menurut Sugiyono (2022), kombinasi teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif diperlukan untuk memperoleh data yang kredibel dan menggambarkan fenomena secara utuh.

Analisis data dilakukan menggunakan **model analisis interaktif** yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2018). Data yang diperoleh dianalisis secara terus-menerus sejak awal penelitian hingga diperoleh makna yang mendalam tentang kemandirian ekonomi desa. Selanjutnya, proses interpretasi dilakukan dengan memahami simbol, bahasa, dan nilai yang muncul dari narasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Bungin (2020) yang menyatakan bahwa interpretasi dalam penelitian kualitatif bertujuan mengungkap makna di balik tindakan sosial berdasarkan konteks budaya dan pengalaman subjek.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna kemandirian ekonomi dalam Program Desa Mandiri tidak semata-mata diartikan sebagai kemampuan menghasilkan pendapatan, melainkan sebagai bentuk kemampuan mengelola sumber daya lokal secara berkelanjutan. Masyarakat desa menilai bahwa kemandirian ekonomi berkaitan erat dengan kemampuan mereka untuk berdiri di atas potensi sendiri tanpa harus bergantung pada bantuan luar. Hal ini sejalan dengan temuan Rahayu (2023) yang menyatakan bahwa kemandirian ekonomi mencerminkan ketahanan sosial dan kemampuan adaptif masyarakat terhadap perubahan lingkungan ekonomi.

Dalam konteks Desa Mandiri, kemandirian ekonomi muncul dari kesadaran kolektif masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya desa. Partisipasi ini diwujudkan melalui pembentukan kelompok usaha bersama dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Priyono dan Setiawan (2021), keberadaan BUMDes menjadi simbol perubahan sosial yang signifikan karena mampu mengintegrasikan aktivitas ekonomi dengan nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan.

Selain aspek kelembagaan, penelitian ini menemukan bahwa nilai budaya memiliki peran penting dalam memperkuat makna kemandirian ekonomi. Masyarakat menafsirkan kemandirian sebagai *nggahi rawi pahu*—istilah lokal yang berarti mampu mencukupi kebutuhan tanpa membebani orang lain. Makna ini menunjukkan bahwa kemandirian tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi moral dan sosial. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardikanto (2020) bahwa pembangunan berbasis masyarakat harus berpijak pada nilai-nilai lokal agar memiliki keberlanjutan sosial.

Kemandirian ekonomi juga diartikan sebagai kemampuan untuk mengelola potensi alam desa menjadi sumber kesejahteraan. Beberapa desa yang menjadi lokasi penelitian telah berhasil mengembangkan produk unggulan seperti olahan hasil pertanian, kerajinan tangan, dan wisata desa. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari konsumsi menjadi produksi berbasis lokal. Sebagaimana dikemukakan oleh Sari dan Maulana (2022), transformasi tersebut terjadi ketika masyarakat memiliki akses terhadap informasi, pelatihan, dan jejaring pasar yang mendukung.

Di sisi lain, tantangan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masih cukup besar. Hambatan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya literasi ekonomi masyarakat desa. Beberapa informan mengaku bahwa pengelolaan keuangan usaha desa masih dilakukan secara sederhana tanpa pencatatan akuntabel. Temuan ini memperkuat pandangan Nurhayati (2021) bahwa salah satu faktor penghambat kemandirian ekonomi desa adalah lemahnya kemampuan manajerial dan akuntansi masyarakat.

Meskipun demikian, Program Desa Mandiri terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas masyarakat. Melalui pelatihan dan pendampingan, masyarakat mulai memahami pentingnya perencanaan usaha, pembukuan, serta pengelolaan aset desa. Proses ini menjadi bagian dari pembelajaran sosial yang memperkuat kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi lokal. Sejalan dengan pandangan Mulyadi (2019), pemberdayaan masyarakat harus diarahkan pada pengembangan kapasitas agar mereka mampu menentukan masa depannya secara mandiri.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi tidak dapat dipisahkan dari penguatan kelembagaan desa. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan kondusif bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif. Menurut

Widodo (2021), tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif menjadi landasan penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi. Dalam konteks ini, sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan.

Aspek lain yang menarik adalah bagaimana masyarakat mengaitkan kemandirian ekonomi dengan identitas sosial mereka. Beberapa responden menyatakan bahwa menjadi mandiri berarti menjaga martabat dan harga diri desa. Pandangan ini menunjukkan bahwa kemandirian memiliki makna simbolik yang mendalam, tidak hanya ekonomi tetapi juga sosial dan budaya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rini dan Yuliana (2022) yang menegaskan bahwa pembangunan desa yang berorientasi pada pemberdayaan identitas lokal mampu menciptakan solidaritas sosial yang kuat.

Dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri, inovasi menjadi elemen penting yang mendorong munculnya kreativitas masyarakat desa. Misalnya, penggunaan teknologi digital untuk promosi produk desa dan manajemen BUMDes menjadi strategi baru dalam menghadapi pasar modern. Penelitian oleh Lestari (2023) menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital oleh masyarakat desa meningkatkan efisiensi ekonomi sekaligus memperluas jejaring pasar. Dengan demikian, inovasi digital menjadi bagian integral dari proses menuju kemandirian ekonomi.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa makna kemandirian ekonomi juga berkaitan dengan proses reflektif masyarakat terhadap pengalaman masa lalu. Sebelum adanya program, sebagian masyarakat bergantung pada bantuan pemerintah atau tengkulak. Namun setelah terlibat dalam Program Desa Mandiri, mereka mulai menyadari pentingnya mengelola potensi sendiri. Proses reflektif ini menggambarkan perubahan kesadaran dari *ketergantungan* menuju *kemandirian*. Sebagaimana dijelaskan oleh Bungin (2020), perubahan makna sosial merupakan hasil dari interaksi antara pengalaman empiris dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

Dalam dimensi sosial, kemandirian ekonomi juga memperkuat solidaritas antarwarga. Kegiatan ekonomi yang dilakukan secara kolektif, seperti koperasi desa atau kelompok usaha bersama, memperkuat jaringan sosial dan menumbuhkan rasa memiliki. Hal ini sesuai dengan temuan Rahayu (2023) bahwa solidaritas sosial menjadi prasyarat penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi lokal. Gotong royong, sebagai nilai sosial khas masyarakat Indonesia, menjadi dasar bagi terciptanya kemandirian yang berakar pada budaya lokal.

Program Desa Mandiri juga berhasil mengubah pola hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Jika sebelumnya masyarakat menjadi objek kebijakan, kini mereka berperan sebagai subjek pembangunan. Pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator dan pendamping. Transformasi ini menunjukkan adanya perubahan paradigma pembangunan yang lebih partisipatif dan berbasis masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Kartasasmita (2018), bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika masyarakat menjadi pelaku utama dalam prosesnya.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa keberhasilan kemandirian ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menjaga keberlanjutan usaha. Beberapa BUMDes yang berhasil memiliki sistem pengelolaan keuangan yang transparan, pembagian keuntungan yang adil, dan inovasi produk berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi harus didukung oleh tata kelola yang baik dan budaya organisasi yang kuat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa makna kemandirian ekonomi dalam Program Desa Mandiri bersifat multidimensional — mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya,

dan kelembagaan. Proses menuju kemandirian bukan hanya soal pencapaian ekonomi, melainkan juga pembentukan identitas sosial dan kesadaran kolektif masyarakat untuk hidup mandiri. Dengan demikian, kemandirian ekonomi dapat dipahami sebagai hasil sekaligus proses dari transformasi sosial yang berkelanjutan..

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa makna kemandirian ekonomi dalam Program Desa Mandiri bersifat multidimensional dan berakar kuat pada nilai-nilai sosial serta budaya lokal masyarakat. Kemandirian ekonomi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan menghasilkan pendapatan, tetapi juga sebagai bentuk kesadaran kolektif untuk mengelola potensi desa secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Program Desa Mandiri telah mendorong masyarakat untuk bertransformasi dari posisi ketergantungan menjadi subjek pembangunan yang aktif dan berdaya. Melalui penguatan kelembagaan seperti BUMDes, pelatihan, serta pengelolaan potensi lokal, masyarakat desa menunjukkan kemampuan untuk menciptakan nilai ekonomi dan sosial yang memperkuat kesejahteraan bersama. Temuan ini menegaskan bahwa kemandirian ekonomi tidak semata-mata merupakan hasil kebijakan, tetapi proses sosial yang menumbuhkan rasa percaya diri, gotong royong, dan solidaritas antarwarga.

Selain itu, kemandirian ekonomi yang berkembang melalui Program Desa Mandiri memperlihatkan adanya sinergi antara inovasi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola yang baik. Nilai-nilai budaya seperti kerja sama dan tanggung jawab sosial menjadi fondasi utama dalam memperkuat keberlanjutan ekonomi desa. Dengan demikian, keberhasilan kemandirian ekonomi tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu menjaga identitas, partisipasi, dan kedaulatan ekonomi mereka sendiri. Oleh karena itu, upaya pengembangan desa mandiri ke depan perlu diarahkan pada penguatan kapasitas manusia, pengembangan inovasi berbasis potensi lokal, serta pelestarian nilai-nilai sosial budaya sebagai pijakan utama dalam membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Variasi Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kartasasmita, G. (2018). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: LP3ES.
- Mardikanto, T. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Surakarta: UNS Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode Baru*. Jakarta: UI Press.

- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Lokal*. Bandung: Alfabeta.
- Nurhayati, S. (2021). Kemandirian Ekonomi Desa melalui Optimalisasi Potensi Lokal. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 10(2), 115–126.
- Priyono, H., & Setiawan, B. (2021). Peran BUMDes dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 5(1), 45–56.
- Rahayu, M. (2023). Kemandirian Ekonomi Desa dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 7(1), 30–42.
- Sari, D., & Maulana, F. (2022). Evaluasi Implementasi Program Desa Mandiri di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(3), 221–235.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Widodo, A. (2021). Makna Kemandirian dalam Konteks Sosial Ekonomi Pedesaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(1), 60–72.